*Inklusif: Jurnal Sosial Humaniora dan Peradaban Nusantara*
*Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 116 - 125*
*Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Inklusif/article/view/481*
*E-ISSN: 3164-4422*

# Analisis Dampak Keberadaan Joglo Wisanggeni terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalangan, Kecamatan Tulung

**Surya Apriyana[1], Mohammad Agung Ridlo[2]**
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia [1,2]
Corresponding Author: *suryaapriyana@gmail.com[1*]*

***Info Artikel***
***Received:*** *27 Agustus 2026*
***Revised :*** *04 September 2026*
***Accepted:*** *15 September 2026*
***Published:*** *30 September 2026*

***Keywords:*** *village asset, multiplier effect, PADes.*

***Abstract***
*The utilization of village assets is a highly critical strategy for local governments to build financial autonomy and reduce their dependence on central government funding. This study aims to analyze the direct, indirect, and induced economic impacts (multiplier effects) of the newly established Joglo Wisanggeni Convention Hall in Dalangan Village, Tulung District, Klaten Regency. The analytical method used in this research is a descriptive-qualitative method through in-depth interviews, field observation, and document analysis. Strategies to optimize the contribution of village assets include enhancement of physical facilities, parking management, legal protection through village regulations, and marketing digital transformation. The findings show that transforming the abandoned land of SD Negeri 2 Dalangan into a productive convention hall provides substantial benefits. Officially on Siskeudes, it contributes IDR 17,000,000 to village original income (PADes). However, deep-dive financial reconciliation indicates the actual net profit reaches IDR 67,347,500, which functions as a vital off-budget fiscal safety valve to cover community welfare insurance and administrative deficits. Indirectly, the asset absorbs 3–7 casual local laborers per event and empowers home-based catering. Induced impacts are actively captured by 5–7 itinerant street vendors around the entrance corridor, although fixed retail shops face spatial proximity barriers. In conclusion, rural asset commercialization effectively prevents regional economic leakage and drives the grassroots community economy.*

***Kata Kunci****:* aset desa, multiplier effect*, PADes*.

***Abstrak***
Pemanfaatan aset desa merupakan salah satu strategi penting bagi pemerintah lokal dalam membangun kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi langsung, tidak langsung, dan dampak lanjutan (multiplier effect) dari operasional Gedung Pertemuan Joglo Wisanggeni di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif interpretif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen laporan keuangan. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan kontribusi aset desa ini adalah dengan meningkatkan kualitas fasilitas fisik bangunan, tata kelola manajemen parkir, penguatan regulasi desa, serta transformasi pemasaran berbasis digital. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa perubahan lahan mangkrak eks-SD Negeri 2 Dalangan menjadi gedung serbaguna terbukti memberikan banyak

manfaat. Secara administrasi resmi pada Siskeudes, gedung menyumbang Rp17.000.000 terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, hasil rekonsiliasi kas menemukan keuntungan bersih riil mencapai Rp67.347.500 yang berfungsi vital sebagai katup penyelamat fiskal (fiscal safety valve) luar anggaran untuk mendanai defisit jaminan sosial aparatur tapak dan listrik desa. Secara tidak langsung, operasional gedung mampu menyerap 3–7 tenaga kerja lepas lokal per acara serta memberdayakan katering rumahan warga. Dampak lanjutan dirasakan secara responsif oleh 5–7 pedagang dadakan keliling di koridor gerbang masuk, meskipun toko kelontong menetap terhambat rintangan kedekatan spasial. Dengan adanya komersialisasi aset perdesaan, secara tidak langsung dapat menahan kebocoran ekonomi wilayah dan berujung pada peningkatan perekonomian masyarakat akar rumput.

***This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.***
***Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner***

## PENDAHULUAN

Kemandirian fiskal sebuah desa sangat bergantung pada kemampuan tata pamong dalam mengidentifikasi, mengonsolidasikan, dan mengelola kekayaan asli yang dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan desa dalam mendayagunakan aset produktif secara mandiri. Pengelolaan aset berupa bangunan atau gedung pertemuan yang dikelola secara profesional terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan bagi struktur pendapatan desa. Pemanfaatan kembali aset yang lama telantar (idle asset) menjadi sarana publik komersial yang produktif tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya kemandekan fungsi ruang, melainkan juga secara aktif menggerakkan potensi ekonomi lokal demi kemakmuran masyarakat desa secara berkelanjutan.

Transformasi tata ruang perdesaan kini dituntut untuk mampu melahirkan inovasi yang bertindak sebagai generator pertumbuhan ekonomi mikro (growth pole) di kawasan pinggiran (hinterland). Salah satu contoh implementasinya adalah keputusan Pemerintah Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dalam merombak lahan tidur bekas gedung pertemuan lama dan eks-SD Negeri 2 Dalangan yang telah mangkrak sejak tahun 2008. Lahan gabungan tersebut dibangun kembali menjadi kompleks prasarana publik terpadu bernilai guna tinggi (Highest and Best Use) yang diberi nama Gedung Pertemuan Joglo Wisanggeni. Eksistensi gedung ini diproyeksikan sebagai pusat kegiatan multiguna komersial untuk menahan arus perputaran uang agar tidak keluar dari batas administratif desa, sekaligus memitigasi terjadinya kebocoran ekonomi wilayah (regional

economic leakage).

Pendekatan multiplier effect (efek pengganda) ekonomi sangat relevan digunakan untuk melacak sejauh mana penyediaan sarana publik buatan (man-made public amenities) berputar secara berlapis di masyarakat bawah. Aliran dana sewa tidak hanya berhenti di kas BUMDes selaku pengelola resmi, melainkan mengalir ke sektor jasa pendukung formal hingga menyentuh pedagang kecil sektor informal. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi penataan dan pengelolaan yang tepat agar Joglo Wisanggeni mampu menyumbang pendapatan mandiri secara berkelanjutan tanpa mengabaikan inklusivitas ruang sosial bagi warga lokal Desa Dalangan.

## METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif interpretif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini dilakukan secara sistematis guna mengeksplorasi fenomena sosial-ekonomi keruangan di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga Maret tahun 2026.

Metode pengumpulan data memadukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi Kepala Desa Dalangan (regulator), Ketua BUMDes (operator), tenaga pemeliharaan gedung, pengusaha katering lokal, pemilik warung kelontong, dan kelompok pedagang dadakan keliling. Triangulasi metode diperkuat melalui teknik observasi lapangan secara sistematis saat jam puncak acara (peak hours) serta teknik dokumentasi terhadap berkas nota harian, laporan kas BUMDes, dan Siskeudes APBDes. Proses analisis data dikerjakan secara siklikal interaktif mencakup tahap kondensasi data, penyajian data (data display) berupa matriks dampak, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Fisik dan Karakteristik Aktivitas Pemanfaatan Spasial

Gedung Pertemuan Joglo Wisanggeni berdiri di atas lahan gabungan strategis hasil revitalisasi total lahan terbengkalai bekas gedung pertemuan lama dan eks-SD Negeri 2 Dalangan yang telah mangkrak sejak tahun 2008. Kompleks prasarana terpadu ini dibangun secara bertahap sejak tahun 2017 hingga rampung total pada akhir tahun 2023 dengan sistem penganggaran multi-years

bersumber dari Dana Desa (DDS) berakumulasi sekitar Rp1.000.000.000. Proyek fisik sempat mengalami penundaan (refocusing anggaran) pada tahun 2020 untuk penanganan darurat pandemi Covid-19. Gedung ini diresmikan langsung oleh Bupati Klaten, Ibu Sri Mulyani pada 22 November 2023.

Secara konsep arsitektur, gedung ini dirancang menggunakan langgam pendopo Jawa terbuka (open-plan) tanpa sekat dinding bata pada sisi timur, utara, dan selatan. Struktur terbuka ini sengaja diaplikasikan untuk menghasilkan sistem ventilasi silang (cross-ventilation) alami guna mengantisipasi suhu ruang yang pengap serta mengoptimalkan kenyamanan termal (thermal comfort) tanpa tergantung pada pengondisi udara mekanis. Berdasarkan analisis fungsional perencanaan kota, gedung ini bertindak sebagai wadah multiguna (multi-event venue) skala regional tingkat Kecamatan Tulung yang melayani empat klaster pergerakan massa:

1. Kegiatan Sosial Domestik Warga: Berfungsi sebagai tempat resepsi pernikahan (*wedding venue*) adat Jawa yang menjadi solusi atas kendala keterbatasan pekarangan rumah tinggal pribadi (spatial constraint) akibat peningkatan kepadatan permukiman desa.
2. Kegiatan Institusional Pemerintahan: Pusat pelaksanaan koordinasi formal Musrenbangdes, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK, dan rapat gabungan Gapoktan.
3. Kegiatan Ekonomi Kreatif: Penyelenggaraan pasar murah ramadhan, bazar niaga produk UMKM industri rumahan makanan kue sagon tradisional dan mie soun khas Dalangan.
4. Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan: Wadah latihan rutin pentas seni drumband Taman Kanak-Kanak (TK) lokal serta ruang ekspresi komunitas kebudayaan pemuda desa.

**Analisis Dampak Ekonomi Berantai (Multiplier Effect)**

**1. Dampak Langsung (Direct Effect) terhadap Kas Desa**

Mekanisme penarifan sewa dasar gedung dikendalikan satu pintu oleh unit usaha BUMDes Dalangan dengan menerapkan sistem subsidi silang yang inklusif. Warga asli ber-KTP Desa Dalangan diberikan subsidi sewa sebesar 50% (tarif Rp2.500.000 per acara), sedangkan penyewa eksternal/luar daerah dikenakan tarif komersial penuh sebesar Rp5.000.000 per acara.

Pada tahun anggaran 2025, catatan resmi dalam laporan aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) menunjukkan kontribusi tunai flat sebesar Rp17.000.000. Namun, melalui dekonstruksi finansial mendalam (deep-dive financial audit) dengan menjumlahkan seluruh manifes transaksi nota harian sewa perlengkapan logistik sarpras yang dihitung terperinci per unit (sewa kursi Rp2.000/biji, meja+taplak Rp5.000/biji, sound system, panggung, dan kipas angin), peneliti menemukan margin

pendapatan riil lapangan yang berbeda nyata seperti disajikan pada Tabel 4 berikut:

***Tabel 4.*** *Rekonsiliasi Arus Kas Riil Unit Gedung Joglo Wisanggeni (Tahun Buku 2025)*

| No | Uraian Komponen Transaksi Finansial | Uang Masuk (Rp) | Uang Keluar (Rp) | Saldo Akhir (Rp) | Keterangan Operasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sewa Gedung Dasar | 55.250.000 | | 55.250.000 | 13 kali event sewa harian. |
| 2 | Retribusi Sewa Kursi | 23.400.000 | | 78.650.000 | Internal BUMDes. |
| 3 | Retribusi Sewa Meja & Taplak | 10.895.000 | | 89.545.000 | Internal BUMDes. |
| 4 | Retribusi Sewa Sound & Panggung | 5.850.000 | | 95.395.000 | Total Pendapatan Bruto. |
| 5 | Belanja Sewa Kursi Pihak Ketiga | | 9.750.000 | 85.645.000 | Out-sourcing vendor. |
| 6 | Belanja Sewa Meja Pihak Ketiga | | 2.047.500 | 83.597.500 | Out-sourcing vendor. |
| 7 | Upah Tenaga Kerja Lepas Acara | | 7.800.000 | 75.797.500 | Kru harian Karang Taruna. |
| 8 | Biaya Utilitas Pasca-Event | | 650.000 | 75.147.500 | Sampah & token listrik. |
| 9 | Gaji Ketua BUMDes | | 4.800.000 | 70.347.500 | Manajemen tetap. |
| 10 | Gaji Petugas Kebersihan Tetap | | 3.000.000 | 67.347.500 | Laba Bersih Aktual. |

Berdasarkan data Tabel 4, total pendapatan kotor properti menyentuh Rp95.395.000 dengan laba bersih aktual mencapai Rp67.347.500. Terjadinya kesenjangan (gap) fiskal sebesar Rp50.347.500 dari laporan tunai desa (Rp17.000.000) dianalisis akibat adanya pembengkakan belanja jaminan sosial luar perencanaan (budget overrun) di akhir tahun 2025. Pemerintah Desa Dalangan mengalami defisit karena melonjaknya tagihan premi asuransi perlindungan jaminan BPJS

Ketenagakerjaan untuk seluruh aparatur tingkat tapak (Ketua RT, RW, Linmas, Hansip, pengurus PKK desa) sebesar Rp21.087.000, pengadaan parsel hari raya warga miskin (Rp6.330.000), serta listrik balai desa (Rp2.500.000).

Ketika dihadapkan pada defisit, pemerintah desa terbentur oleh rigiditas sistem aplikasi Siskeudes nasional yang mengunci pagu plafon sosial flat di angka Rp17.000.000 serta menolak input revisi anggaran darurat di tengah jalan. Sebagai jalan keluar logis, Pemdes menerapkan kebijakan off-budgeting taktis dengan langsung menyerap sisa surplus laba bersih gedung sebesar Rp50.347.500 di lapangan untuk melunasi kekurangan jaminan sosial perangkat desa tersebut. Temuan ini menegaskan keunggulan elastisitas ekonomi Gedung Joglo Wisanggeni yang berfungsi vital sebagai katup penyelamat fiskal (fiscal safety valve) dalam menjaga keberlanjutan pelayanan sosial.

**2. Dampak Tidak Langsung (Indirect Effect)**

Dampak tidak langsung terukur melalui serapan tenaga kerja lokal harian serta pemberdayaan rantai pasok lokal (local supply chain). Unit properti ini menghidupi 1 orang manajer operasional dan 1 tenaga kebersihan harian tetap (Pak Suwahman dengan upah Rp250.000/bulan). Pada pilar tenaga kerja lepas (casual labor pool), operasionalisasi event pernikahan berskala besar menyerap secara dinamis 3 hingga 7 orang pemuda Karang Taruna dan warga lokal per acara. Kebutuhan 1.000 kursi menyerap 3–5 pekerja, sedangkan luapan 1.500–1.800 kursi menyerap 6–7 pekerja dengan sistem upah Rp50.000 per pemotongan beban kerja posisi (rata-rata kru membawa pulang upah tunai harian Rp150.000–Rp200.000 per acara pasca-bubaran). Sektor jasa boga terberdayakan, di mana terdapat 2 unit usaha katering skala rumah tangga milik warga asli Desa Dalangan (Katering Berkah dan Sedap Rasa) yang secara berkala ditunjuk melayani konsumsi rapat dinas dengan porsi di bawah 200 pax.

**3. Dampak Lanjutan (Induced Effect)**

Dampak lanjutan mengamati sirkulasi lanjutan kapital yang diterima untuk dibelanjakan kembali ke sektor ritel perdesaan. Hasil analisis spasial mendeteksi adanya rintangan kedekatan jarak fisik (spatial proximity barrier). Pemilik warung makan permanen dan toko kelontong menetap milik warga (seperti Toko Berkah dan Toko Murah) mengaku sama sekali tidak merasakan lonjakan omzet harian karena posisi spasial toko mereka terpencar dalam radius di atas 500 hingga 600 meter dari posisi gerbang luar gedung. Tamu undangan cenderung enggan memobilisasi kendaraan mereka terbentur cuaca panas gersang hanya untuk membeli rokok atau minuman ringan.

Sebaliknya, peluang ekonomi berputar responsif di tangan sektor informal dinamis. Sebanyak 5 hingga 7 orang pedagang dadakan keliling (penjual mainan anak, es krim, balon, dan jajanan pasar)

secara konsisten menggelar lapak musiman di sepanjang koridor trotoar pintu masuk utama setiap kali pesta pernikahan berlangsung, menghasilkan keuntungan instan bagi kelompok ekonomi akar rumput tanpa dikenakan pungutan liar oleh pengelola.

**Analisis Faktor Penghambat Teknis dan Manajerial**

Kendala Kenyamanan Termal Internal: Ruang ganti pakaian dan ruang tunggu rias pengantin di sisi utara-timur dinilai memiliki tata sirkulasi udara mikro yang buruk, pengap, dan sangat panas di siang hari karena minimnya bukaan ventilasi dan kurangnya kapasitas unit pendingin ruangan (AC), sehingga memicu komplain lunturnya riasan pengantin.

Masalah Sirkulasi dan Keselamatan Transportasi (Spatial Safety): Terjadi spatial mismatch pada tata letak perparkiran. Parkir mobil memanfaatkan lapangan desa di sisi selatan, sedangkan parkir motor diletakkan di lahan paving terbuka seberang jalan kolektor desa yang gersang. Pemisahan ini memicu risiko konflik kecelakaan lalu lintas bagi tamu sepuh yang menyeberang jalan tanpa adanya marka penyeberangan (zebra cross) formal pada jam puncak acara.

Kelemahan Tata Kelola Keuangan dan Pemasaran: Administrasi akuntansi BUMDes belum menerapkan pemisahan akun biaya unit usaha komersial secara ketat, di mana pengeluaran operasional dicampuradukkan dengan belanja rutin domestik balai desa (seperti pembelian kawat umbul-umbul, sapu kantor, dan MMT APBDes). Selain itu, strategi pemasaran masih pasif mengandalkan promosi konvensional dari mulut ke mulut (word of mouth) tanpa adanya digitalisasi media sosial resmi, sehingga gedung terpantau sepi penyewa pada hari kerja (weekdays).

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah bahwa komersialisasi kekayaan desa melalui pembangunan Gedung Pertemuan Joglo Wisanggeni terbukti sukses mentransformasi lahan tidur mangkrak eks-SD Negeri 2 Dalangan menjadi instrumen generator pertumbuhan ekonomi mikro perdesaan yang tangguh. Secara administratif formal (Siskeudes), kas masuk tunai dibukukan flat sebesar Rp17.000.000, namun secara aktual operasional lapangan properti ini berhasil mencetak keuntungan bersih riil mencapai Rp67.347.500 pada tahun anggaran 2025. Sisa dana dialokasikan secara taktis (off-budgeting) sebagai katup penyelamat fiskal untuk menutup defisit pengeluaran premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan seluruh aparatur RT/RW/Linmas desa. Keberadaan gedung berhasil menyerap 3–7 tenaga kerja lepas bersumber dari pemuda Karang Taruna serta menghidupi komunitas pedagang informal dadakan di koridor jalan masuk. Namun demikian,

optimalisasi perputaran modal masih terhambat oleh buruknya kenyamanan termal ruang rias pengantin, risiko sirkulasi penyeberangan parkir motor, dan ketiadaan digitalisasi sistem pemasaran.

## SARAN

1. Rekomendasi Bagi Pengelola Desa Wisata/BUMDes:

Meningkatkan kualitas layanan komersial melalui penerapan skema Opsi Paket Pernikahan Terpadu Berbasis Inklusi Lokal (All-in One Local Wedding Cluster). Skema ini memberikan stimulus potongan harga sewa jika konsumen memilih paket katering (melibatkan 2 katering rumahan warga) dan tim dekorasi lokal desa.

Melakukan renovasi minor fisik infrastruktur dengan memasang unit pendingin ruangan (AC) pada ruang rias pengantin guna menjaga kenyamanan mikro termal ruang dalam.

Meningkatkan manajemen keselamatan transportasi (spatial safety) dengan membangun marka penyeberangan jalan yang aman (zebra cross) di depan gerbang utama serta menempatkan kru parkir Karang Taruna secara terstruktur saat jam puncak acara.

Bermigrasi total dari promosi mulut ke mulut menuju Sistem Pemasaran Digital Modern (Digital Marketing Conversion) dengan membuat dan mengaktifkan akun media sosial resmi (Instagram, TikTok) yang menyajikan katalog visual estetis serta kalender keterisian gedung guna menarik konsumen luar wilayah pada hari kerja (weekdays).

2. Rekomendasi Bagi Pemerintah Desa/Daerah:

Penyusunan dan formalisasi Peraturan Desa (Perdes) Baru tentang Tata Kelola Aset dan Laba Bersih BUMDes agar seluruh kebijakan sirkulasi keuangan darurat (off-budgeting) akibat kaku dan rigidnya aplikasi Siskeudes pusat tetap berstatus akuntabel, transparan, dan bersih di mata hukum.

Pemberian alokasi dukungan dana stimulan untuk penghijauan berupa penanaman pohon peneduh di area lahan parkir motor seberang jalan agar tidak gersang terpapar matahari.

Mengintegrasikan fungsi aula Joglo dengan daya tarik kolam pemancingan sisi utara, gazebo rekreasi, serta kompleks Kios Pujasera Sendang Biru menjadi kesatuan paket destinasi wisata kuliner dan budaya yang terpadu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik, dan Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T. selaku

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota atas segenap dukungan penyediaan fasilitas akademik. Apresiasi tertinggi juga penulis haturkan kepada jajaran Pemerintah Desa Dalangan, pengurus operasional unit usaha BUMDes, serta seluruh warga pelaku usaha katering dan komunitas pedagang kecil keliling di koridor Kecamatan Tulung yang telah bersedia memberikan izin riset, keterbukaan data keuangan, serta bantuan informatif selama pelaksanaan survei lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, T. (2021). Ekonomi Perdesaan dan Optimalisasi Kelembagaan Lokal. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 12(1), 145–148.

Ashfihisa, R. (2019). Pengaruh Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 11(3), 89–95.

Brown, M. (2023). The Keynesian Multiplier in Rural Economic Development. Journal of Development Economics, 33(4), 210–225.

Davis, L. (2021). Evaluating the Highest and Best Use for Local Government Property. Journal of Property and Real Estate Research, 19(2), 45–58.

Huda, N. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Pusat Studi Pemerintahan Daerah, 4(2), 102–115.

Jamei, M., et al. (2022). Rural Public Infrastructure and Local Economic Multiplier. Journal of Rural and Regional Studies Elsevier Science, 15(2), 301–314.

Lestari, A. (2025). Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Gedung Komunitas. Jurnal Kebudayaan dan Interaksi Sosial, 2(1), 15–28.

Pratama, Y. (2024). Evaluasi Kinerja Keuangan BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Mandiri Desa. Jurnal Akuntansi Akuntabel dan Bisnis, 5(2), 77–88.

Priyanto, J. A. (2020). Implementasi Kebijakan Desa dalam Mengembangkan BUMDes. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia Lembaga Administrasi Negara, 7(1), 54–66.

Puspita, R. (2023). Manajemen Aset Daerah dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Yogyakarta: Gava Media.

Sari, P. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Aset Desa Periode 2015-2019 (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Setiawan, B. (2021). Perencanaan Sarana Prasarana Desa Berbasis Pendekatan Wilayah. Jurnal Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah, 6(3), 112–124.

Sinurat, M., & Marpaung, J. (2022). Optimalisasi BUMDes dan Pengelolaan Aset Desa Terhadap Peningkatan PADes. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Regional Universitas Cenderawasih, 17(1), 33–46.

Siregar, D. D. (2024). Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Smith, J. (2020). Management of Publicly Owned Assets in Developing Countries. International Asset Management Journal, 26(1), 88–99.

Subehi, F. (2020). Peran BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok. Jurnal Pengembangan Sosial Wilayah Ikatan Sosiolog Pedesaan, 5(4), 120–135.

Turner, K. (2024). Socio-Economic Impact of Community Halls in Rural Settlements. Journal of Community Infrastructure Sage Publications, 22(1), 67–80.

Utami, R. (2023). Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Fasilitas Publik. Jurnal Keuangan dan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah, 10(4), 143–156.

Wibowo, S. (2022). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Optimalisasi Aset Desa. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa, 12(1), 22–37.